

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya keberadaan Pertamina di Kota Padang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: adanya resistensi administrasi dan perizinan usaha bagi calon penyalur BBM yang diakibatkan oleh terjadinya benturan antara standar tinggi regulasi pemerintahan dengan kapasitas ekonomi masyarakat lokal. Selanjutnya, ketidakmampuan pemenuhan sarana dan fasilitas operasional penyalur yang diakibatkan keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat, adanya pihak yang memfasilitasi dan menawarkan kemudahan alat penyaluran BBM, serta ketidakmampuan pemilik kios Pertamina dalam memenuhi kriteria lokasi usaha penyalur yang ditetapkan. Hal ini, kemudian mengakibatkan kegiatan penyaluran BBM kepada masyarakat tidak merata, terjadinya kenaikan harga BBM, dan kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan tidak terjamin. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, agar tujuan awal pembentukan regulasi ini dapat tercapai dan terealisasi di masyarakat.
- 5.1.2 Faktor penghambat Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan penertiban Pertamina berdasarkan Permen ESDM nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internalnya yaitu: koordinasi yang kurang antar lembaga penyelenggaraan aturan yang diakibatkan regulasi yang bersifat sentralistik; ketiadaan anggaran dari pusat; terbatasnya sistem teknologi pengawasan yang dimiliki

pertamina; proses penyesuaian hukum terhadap regulasi yang terus berubah; dan ketiadaan evaluasi yang dilakukan BU-PIUNU. Adapun faktor penghambat eksternalnya yaitu: kesadaran hukum masyarakat kurang, hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan sebagian masyarakat dan tidak adanya kepatuhan hukum dalam diri pelaku; dan faktor perekonomian pelaku usaha, karena sebagian besar pelaku usaha adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan penghasilan mereka juga tidak menentu.

- 5.1.3 Pelaksanaan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Padang dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*, dapat disimpulkan bahwa praktik Pertamina secara substansial melanggar prinsip ketaatan kepada pemimpin (*tha'at ulil amri*) karena beroperasi tanpa legalitas usaha dan mengabaikan kontrak sosial terkait retribusi serta perlindungan diri (*hifzhun nafsi*). Hal ini diperburuk oleh disfungsi birokrasi dalam aspek tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dan pengawasan (*al-hisbah*), di mana sentralisasi wewenang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta ketiadaan anggaran daerah menyebabkan regulasi menjadi tidak efektif dan kehilangan esensi kemaslahatan publik. Selain itu, meskipun Pertamina didorong oleh motif ekonomi, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* menegaskan bahwa pencegahan risiko kebakaran dan perlindungan amanah distribusi BBM bersubsidi (Pertalite) harus diprioritaskan di atas keuntungan individu. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum Islam, diperlukan langkah kolaboratif antar-instansi untuk melakukan penertiban atau transformasi Pertamina menjadi entitas legal seperti Pertashop guna menjamin keadilan dan keamanan masyarakat luas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan pada pihak pemerintah terutama Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi secara masif dengan pemerintah daerah, karena pendelegasian tanpa anggaran akan membuat pihak yang didelegasikan tidak menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Pihak PT Pertamina evaluasi lapangan terkait kekosongan BBM di SPBU agar bisa segera dilaksanakan. Selanjutnya untuk Pemerintah Kota Padang terutama Dinas Perdagangan agar dapat berkolaborasi dengan lembaga dan badan usaha niaga lainnya untuk melakukan program penyuluhan dan edukasi terkait usaha berbasis resiko dan mekanisme pengurusan izin usaha kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat diharapkan dapat memahami isi hukum terlebih dahulu sebelum membuka usaha, hal ini dapat dilakukan dengan mengakses aturan hukum melalui JDIH, maupun bertanya pada pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Hal ini bertujuan agar ketika masyarakat menjalankan suatu usaha, usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Disisi lain, untuk aparatur pemerintahan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat sesuai dengan kemampuan rakyat, menetapkan standar pekerja yang sesuai dengan profesionalitas dunia kerja, bukan memandang unsur pendidikan, keluarga, relasi ataupun penampilan, tetapi melihat potensi yang ada pada dirinya. Mendukung secara penuh usaha dengan mengalokasikan dana untuk rakyat dalam membuka kegiatan usaha. Sehingga dengan hal tersebut, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Robith (2025, 19 September). Izin Usaha Penyalur BBM: Panduan Lengkap Untuk Pelaku Usaha. PT Megah Anugerah Energi. <https://solarindustri.com/blog/izin-usaha-penyalur-bbm/>
- Adriansyah, K Z & Sutrisno Hadi.2024.Konsep Sistem Pemerintahan dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Mubarak: Islamic Studies Journal, Volume 1, Nomor 1* halaman 9-21
- Africhal, Moh. 2023. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI (Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu). *Skripsi UIN Datokarama Palu*
- Agata, Silvia F.2025.Peran Pendamping PKH Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah.*Riau:Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim*
- Ajis, Muhammad. 2020. Tinjauan Hukum tentang jual Beli BBM dengan Nama Pertamina Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Studi Kasus Kelurahan Tanete Riattang Barat, Mare, dan Tellu Siattinge). *Skripsi IAIN Bone*
- Alfianto.2024.*Statistik Daerah Kota Padang 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Padang
- Alfianto.2025.*Kota Padang Dalam Angka 2025 Volume 46*. Badan Pusat Statistik Kota Padang
- Al-Maududi, Abul A'la.1990. *The Islamic Law and Constitution (Asep Hikmat, Terj.)* Bandung:Mizan
- Al-Mawardi, Imam. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Fadli Bahri, Terj.) Jakarta: PT Darul Falah
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. (2003). *Al-Ushul Min 'Ilmil-Ushul* (Ahmad S Marzuki, Terj.) Yogyakarta: Media Hidayah
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih.2009. *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta:Griya Ilmu.

- Al-Sudairi, Tawfiq bin Abdul Aziz. 2004. *Al-Islam Wa Al-Dustur*. Riyadh: Ministry of Islamic Affairs, Endowment, Da'wah, and Guidance
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Peraturan Hidup Dalam Islam (Nizham Al-Islam); Abu Amin, dkk. Terj.* Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia
- Arfah, Hamzah & Dheri Agriesta. 24 November 2022. Pom Mini di Lamongan Terbakar, Diduga akibat Korsleting. Surabaya Kompas. <https://share.google/FiCp6WKuQQwnnRPV4>
- Asnan, Gusti. 2021. Citra dan Identitas Kota Padang Dalam Lintasan Sejarahnya. Padang: Makalah Seminar Sehari "Museum dalam Perspektif Sejarah dan Pendidikan"
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 8 (Abdul Hayyie Al-Kattani, Terj.)* Jakarta: Gema Insani
- Azzura, Salsabila. 2023. Penerapan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pantai Padang). *Skripsi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang*
- Begouvic, M Eza Helyata. 2022. Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Lex Superior, Volume 1 (1)* <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls>
- Bintarto, M al Ikhwan dkk. 2019. Penerapan Fungsi Dan Peran Al Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 3 (803-814)*. <https://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>
- B, Rhandi Anjasuma. 2021. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Mengenai Praktik dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. *Skripsi IAIAN Curup*

- BPH Migas.2020,24 Oktober.*BPH Migas Gelar Sosialisasi Implementasi Sub penyalur dan Penyalur Mini.*
<https://share.google/4qaQ64maeXzKmw7go> di akses pukul 10:29 WIB 06 Januari 2026
- Carwoto.2008. Model Otomasi Berbasis WEB Untuk Pengendalian Proses Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. *Momentum*, Vol. 5, No. 1: 6-10
- Creswell, John W. (2013).*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Ahmad Bintang Lazuardi, Terj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Christian.2013.Peta Wilayah Kota Padang, Sumatera Barat.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:\(Peta Wilayah\)_Kota Padang.svg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:(Peta_Wilayah)_Kota_Padang.svg) diakses pada 23 Januari 2026 pukul 9:43 WIB
- Djazuli, HA.2013.*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah edisi Revisi.*Jakarta:Kencana
- Efendi, Junaidi.2018.*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Depok: Prenada Media Group
- Efrinaldi.2007.*Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Granada Press
- Fahlevi, M Ikram. 2023. Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Penjualan Peralite Dalam Jeriken di SPBU Ditinjau menurut Peraturan Presiden No.117 Tahun 2021 dan At-Ta'sir Al-Jabari (Suatu Penelitian Pada SPBU Di Banda Aceh). *SKRIPSI UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh*
- Fahriza, Ria. 2023. Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum di Daerah Muara Badak Kalimantan Timur. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 4.hal 136-142.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1618>
- Falah, W. Anwar dkk.2000.*Menyingkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama Yang Tersisa.* Sumatera Barat: Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat "Adhityawarman".
- Feis, Imronah.2009. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.* Gema Eksos, vol. 5, no.1
- Firdaus, Sunny Ummul dkk.2023. *Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia.*Surakarta: Universistas Sebelas Maret-MPR

- Fitri, H.2025. Penertiban Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran: Analisis Implementasi Teknis dan Hambatan Struktural pada Satpol PP. Sumedang: *Repository IPDN*, hal. 1-10.
- Grindle, Merilee S.1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Halimi, Imam dkk. 2018. Sistem Kontrol Pada Distribution Fuel Simple System. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro Volume 3: 230-237*
- Hamidah, Aji, Menina Reyhan Bonita, dan Rizky Abdillah Sy. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran. *Jurnal Lex Suprema*, Volume 5 Nomor 1, 17-32
- Hamka.2019.Tafsir Al-Azhar Jilid 2.pdf
- Hamka.2019.Tafsir al-Azhar jilid 8. Pdf
- Hasibuan,N.A, Sudarman dan Lukmanul Hakim.2023.Perkembangan Urbanisasi Kota Padang Tempo Dulu. *JAWI Volume 06 Nomor 02 hal. 110-121*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jaw>
- Hayani, s. (2018). *Eksistensi pertamina mini terhadap penjual bbm eceran di lembang kab. Pinrang (analisis etika bisnis islam)* oleh sitti hayani nim 14.2200.196. Iain pare-pare
- Helim,Abdul.2024.*Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep Dan Implementasi*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.pdf
- Heriadi, Khadijah Fitri.2024."distribusi Bahan Bakar Minyak Di kecamatan Barumun ditinjau dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyaluran BBM.Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
- Hidayat, Rahmat dan Tiswarni.2015. *Modul Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Fi Al-Jinayah Wa As-Siyasah*.Padang
- Hilal, Fatmawati.2020.*Fikih Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Politik Hukum*. Makassar: *Repository UIN Alauddin Makassar*, hal. 18-35.
- <https://kemitraan.patraniaga.com/info/pts>, 2026,17:29 WIB
- Huda, M. M. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Legalisasi Penjualan Bahan Bakar Minyak Unit Pertamina (Studi Kasus Di Kecamatan*

Tirtoyudo Malang Jawa Timur). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ismail, Habib dan Dani A Hakim dan M Lutfi Hakim. 2021. *The Protection of Indonesian Migrant Workers Under Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Lentera Hukum, Volume 8 Issue 1, pp 151-174

Indrianty, Lusi dan Akbar.2022. Sistem Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pt. Pertamina Oleh Cv. Anugerah Bersama Di Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Merauke. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, Volume 13, Nomor 2 <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id>

Iqbal,M. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta: Gaya Media Pratama

Jaidi, Muhammad dkk.2024. Kedudukan Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam. Banjarmasin: *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Volume 2, Nomor 2

Jumbroh Dan M Yoga Yusri P. 2021. Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri

Kadji, Yulianto.2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo

Kamaludin,Safrudin Halimy.2023.*Ringkasan Qawaid Fiqhiyah dan Dhawabith Fiqhiyah dalam Ahwal Syakhshiyah dan Siyasah Syar'iyah*.Padang:Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Kelsen, Hans.(1978). *Pure Theory Of Law/ Teori Hukum Murni (Raisul Muttaqien, Terj.)* 2014. Bandung: Nusa Media

Kementerian ESDM RI.2026. Sejarah Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/id>, di akses 19 Januari 2026

Kementerian Perdagangan RI.2023. *Laporan Tahunan Pengawasan Metrologi Legal: Perlindungan Konsumen atas Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)*. Jakarta: Direktorat Metrologi, hal. 10-15.

Khallaf, Abdul Wahhab.1988. *Al-Siyasah Al- Syar'iyah fi Al-Shu'un Al-Dusturiyah Wa Al-Kharijiyah, Wa Al-Maliyah*.Dubai: Dar Al-Qalam

- Kholilah. 2024. Penerapan PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan penyaluran BBM (Studi kasus di SPBU Gunung Barani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padang Sidimpuan*
- Khusufmawati, Enung.2021. Implementasi Kebijakan Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). Bandung: *Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 4, halaman 713-724*
- Koestoro, Lucas partanda dkk.2007.*Seri Warisan Sumatera Barat Bagian Utara Nomor 0307 "Padang, Kota Andaleh Di Pesisir Barat Sumatera Barat*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Laily, Dhea Rochmatul.2024. Analisis Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. *Skripsi IAIN Ponorogo*
- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang. 2024. Pemerintah Kota Padang*
- Lisnawati,dkk.2025.Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan.*Hidayah:Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah, Volume 2, Nomor 2.*
<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah>
- Lubis, Ali AA Mas Rabbani.2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Lukmana, Rizki Indra.2021. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat. Surabaya: *Digilib UIN Sunan Ampel, hal. 12-20*
- Marshanda, Andini. 2023. Analisis Siyasah Dusturiyah Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah(PROPEMPERDA) Di DPRD Kota Parepare. *Skripsi IAIN PAREPARE*
- Marzuki.2017.*Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Maulana I dan Arinto N.(2023).Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Dan penyalahgunaan BBM Dihubungkan Dengan UU Migas.Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.hal 49-54

- Maulidya,Dini dkk.2025.Keadilan Distributif Dalam Perspektif ekonomi Islam.*Ekopedia:Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 2*.hal 229-236. <https://indojournal.com/index.php/ekopedia>
- Mas'ud, Bahtiar dan Abdul Rahman. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang. Makasar: Citra Multi Persada
- Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram university press
- Muhakki.2011. Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi *Siyasah Dusturiyah*). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam, Volume 1, Nomor 2*
- Muthallib, Salman A dan Muhammad F Ridha. 2019. Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Tafse Journal Of Qur'anic Studies, vol. 4, no. 2*
- Nilamsari, Natalina. 2014. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana, Volume XIII Nomor 2*
- Nurcholis, H. (2023). Pemerintahan Lokal (Local Government). *Negara Bagian Dan Pemerintahan Lokal*, 517. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/51%0Ahttps>
- Nurhayani.2022. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. *Skripsi IAIAN PARE-PARE*
- Nusanto, Irfan Ardyana.2021. Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Volksgeist, vol. 4, no. 1*
- Pauzi, M.F Ridha Bin Mohd.2017. Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan). Banda Aceh: *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam*
- Paramudhita, Radea Respati. 2024. Implikasi Harga Bahan Bakar Pertamina Pada Pemenuhan Komitmen Pemerintah Dalam Menetapkan Harga BBM Di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, Vol 5(2) 2024 : 4502-4510*

Peraturan Menteri ESDM Reubublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, Pub. L. No. 13, 1 (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/142588/permen-esdm-no-13-tahun-2018>

PerBPH MIGAS-06-2015.Pdf, Pub. L. No. 16 Tahun 2015, 8 (2015)

Pramono, Joko.2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press

PT Pertamina patra Niaga. (2024). Sustainability Report/Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Patra Niaga 2024. In <https://patraniaga.com>

Pulungan, Suyuthi.1999. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ramadhana, I. A., Pagala, A., & Fitriyanti, V. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 155–192.
<https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.7369>

Ramadhani, N., Ferianto, & Prasetyo, E. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 284–289. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>

Ridwan.2020. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah
 Rinaldo, M Edward dan Hervin Yoki Pradika. 2021. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal As-Siyasi Volume 1 Nomor 1*

Rivani, Edmira.(2014).Kebijakan Subsidi BBM dan Efisiensi Perekonomian.info singkat ekonomi dan kebijak{Formatting Citation}an publik, vol.VI,No.09.hal 13-16

Roring, Andreas Delpiero dkk.2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.Jurnal Governance Vol.1, No.2

- Siddiqy, FAA dan Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutiana. 2025. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J Volume 7 Nomor 5>
- Siregar, Nurmayana.2022.*Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*.Jurnal Ilmu Sosial Vol.1 No.7
- Situmorang, Jubair.2012.*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.Bandung: CV Pustaka Setia
- Siwi, Yati Oktavia, Karel Yosi Umboh, dan Viktor Demsi Denli K. 2023. Status Hukum Usaha Penjualan BBM oleh Pertashop Di Tinjau Dari Undang-Undang Migas. *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 21, No. 1
- Shofian, Jhodi Hady.2022. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*. *Skripsi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu*
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sofwan, Mardanas dkk.1987.*Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sugono, Dendy.2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta Pusat: Pusat Bahasa
- Sugianto, Ugik. 2020. Implementasi Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap Penjualan BBM Eceran di Kecamatan Kepohbaru Perspektif Masalah Mursalah. *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 13.E/MG.05/DJM/2022
- Suryadi, Daga. 2023. Jual Beli BBM jenis pertamax antara Pertamina dengan Pertashop Perspektif Fikih Muamalah (studi kasus Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota). *Skripsi UIN IB Padang*
- Syamsuddin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada. Ed-1
- Taimiyah, Ibnu.2019.*Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah (Ali bin Muhammad Al-Umran, Pentakhrij: Sulaiman bin Abdullah Al-Umar*

dan Jadie bin Muhammad Al-Jadie, edt.) Riyadh: Dar Ata'at Al-Ilm. Edisi ke-4

Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik, Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Yogyakarta: Suluh Media

Trisnanti, Merista.2016. Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. *Trabajo Infantil*, 1689-1699.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Utami, Beta.2022. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. *Skripsi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu*

Wahyuni, Neti.2023.Primodialisme Masyarakat Minangkabau Dalam Mengembangkan Usaha Dagang (Studi Kasus Usaha Dagang Toko Plastik dan Bahan Kue Minang Di Kecamatan Ciputat Timur). *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

Widjono.2007. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grafindo

Wulandari, Widya.2023. Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi Pada Nelayan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Skripsi UIN Imam Bonjol Padang*

Yadi, Ilham Rahmat dan Yurni Suarti.2022.Tingkat Urbanisasi Di Kota Padang Tahun 2010, 2015, Dan 2020. *Jurnal Bauana, Volume 6, Nomor 3*

Yana, Indra.2021. Analisis Yuridis Eksistensi Penjualan BBM Eceran Melalui Alat Pertamina dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 (No. 1), hal. 40-55*.

Yusuf,Baharudin.2018. Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Eksistensi Konvensi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. Surabaya: *Skripsi UIN Sunan Ampel*

- Zamroni, M., Sahuurab, A. N., Maulidi, M. S., & PJ, A. R. M. (2025). Analisis Qaidah الضرار يزال Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 733-741
- Zulfirman, Rony.2022. Implementasi Metode *Outdoor Learning* Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 3, Nomor 2
- Zulkarnaen, Iskandar dkk.2021. *Buku Politik Praktik Siyash Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing

